

NUR EL-ISLAM: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan

DOI: <https://doi.org/10.51311/nuris.v10i1.551>

ISSN: 2337-7828. EISSN: 2527-6263

<https://ejournal.iainyasnibungo.ac.id/index.php/nurelislam/article/view/551>

GERAKAN SOSIAL MUHAMMADIYAH DI MUNA DALAM BIDANG PENDIDIKAN: MASA KOLONIALISME

Muhammad Alifuddin

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Sulawesi Tenggara
proposlalif@gmail.com

Alhamuddin

Universitas Islam Bandung
alhamuddinpalembang@gmail.com

Nur Jannah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, Sulawesi Tenggara
Nurjannahnur76@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Data primer penelitian, bersumber dari data-data tertulis (dokumen) dan wawancara mendalam. Seluruh data dianalisis melalui tahapan: heuristik, kritik, intepretasi dan historiografi. Penelitian ini menyimpulkan: Pertama, Secara historis Muhammadiyah berperan signifikan dalam proses pencerahan akal budi terhadap masyarakat Muna masa pra kemerdekaan. Hal tersebut setidaknya ditandai dengan giat pencerahan melalui jalur pendidikan, yaitu dengan mendirikan sekolah di Raha dan Mabohi tahun 1932. Lembaga pendidikan tersebut merupakan anti tesa dari gerakan pendidikan berbasis Kristen yang diinisiasi oleh Zending. Kedua, kemampuan elemen Muhammadiyah masa pra kemerdekaan membangun dan memberi layanan pendidikan kepada masyarakat setempat, merupakan bukti dari partisipasi sosial organ ini kepada anak bangsa. Sungguhpun posisi politik Muhammadiyah pada waktu berada dalam ruang sempit dan penuh tekanan dari pemerintah kolonial Belanda, namun faktanya mereka tetap mampu menggerakkan dan memobilisasi sumber daya yang ada sehingga mereka berhasil mendirikan sekolah berbasis Islam sebagai anti tesa dari sekolah yang didirikan oleh Zending. Ketiga, dalam menghadapi colonial Belanda, Muhammadiyah menerapkan gerakan reaksioner antithesis. Pendekatan ini dilakukan untuk membendung gerakan pemurtadan yang dilakukan Zending yang berkolaborasi dengan Belanda. Fakta ini diframing sedemikian rupa sehingga elemen Muhammadiyah Muna mampu memobilisasi masyarakat setempat untuk bereaksi melakukan penentangan atas ketidakadilan yang mereka alami.

Kata Kunci: Gerakan Sosial, Muhammadiyah, Kolonialisme, Pendidikan

Abstract

This research is of a descriptive-analytical nature. The primary data of the research, sourced from written data (documents) and in-depth interviews. All the data were analysed through stages: heuristics, critique, interpretation and historiography. This research concludes: Firstly, historically, Muhammadiyah played a significant role in the process of enlightening the minds of the Muna people in the pre-independence period. This was at least characterised by active enlightenment through education, namely the establishment of schools in Raha and Mabohi in 1932. The educational institution was an anti-testa to the Christian-based education movement initiated by Zending. Secondly, the ability of Muhammadiyah elements in the pre-independence era to build and provide educational services to local communities is evidence of the organisation's social participation in the nation's children. Even though Muhammadiyah's political position at the time was narrow and full of pressure from the Dutch colonial government, the fact remains that they were able to mobilise and use existing resources to establish Islamic-based schools as an anti-testa to the schools established by Zending. Thirdly, in dealing with the Dutch colonial government, Muhammadiyah implemented a counter-reactionary movement. This approach was taken to contain the apostasy movement that Zending was carrying out in collaboration with the Dutch. This was framed in such a way that Muhammadiyah Muna elements were able to mobilise the local community to react against the injustices they experienced.

Keyword : Social Movement, Muhammadiyah, Colonialism, Education

A. PENDAHULUAN

Muhammadiyah dan pendidikan adalah satu kesatuan tak terpisahkan, karenanya di setiap tempat dimana terdapat papan Muhammadiyah, di tempat tersebut lazimnya terdapat lembaga pendidikan Muhammadiyah. Dalam konteks keindonesian, peran Muhammadiyah dalam memajukan pendidikan anak bangsa telah mengiringi perjalanan bangsa ini jauh sebelum Indonesia Merdeka ¹.

¹ Cecep Suryana, "Kiprah Politik Dan Sejarah Organisasi Muhammadiyah Di Indonesia," . . *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 4, no. 14 (2009): 625–38.

James L. Peacock antropolog berkebangsaan Amerika melansir dalam hasil penelitiannya, bahwa pada tahun 1939 atau 27 tahun setelah masa pendiriannya, Muhammadiyah telah membangun 1744 sekolah di semua jenjang tingkatan², yang seluruhnya didedikasikan untuk kemajuan dan pencerahan akal budi bagi anak-anak bangsa yang pada saat itu mengalami kesulitan mengakses dunia pendidikan karena berada dalam hegemoni penjajah Belanda³. Fakta tentang kepedulian Muhammadiyah terhadap pendidikan bangsa ini adalah sesuatu yang menyejarah dan tidak mungkin dipungkiri.

Sebagai bagian komponen masyarakat bangsa, Muhammadiyah memiliki peran historis yang sangat besar dalam mengupayakan dan meningkatkan pendidikan di negeri ini. Realitas tersebut terjadi sejak mula awal organ ini didirikan dan terus berkelanjutan hingga saat ini. Dalam kiprahnya Muhammadiyah terus memperkuat sumber daya yang dimiliki Negara, baik ketika masa krisis maupun di saat perekonomian membaik dalam rangka memberikan layanan sosial. Bahkan dalam sejarahnya Muhammadiyah tetap menyediakan layanan kesejahteraan kepada masyarakat pada saat bangsa dan negara ini berada dalam tekanan

² James L Peacock, *Purifying the Faith: The Muhammadiyah Movement in Indonesian Islam, Terj* (Yogyakarta: Andi Makmur Makkah, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1968).

³ Karel A Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Moderen* (Jakarta: LP3ES, 1994).

kolonialisme⁴. Berangkat dari perspektif tersebut, penelitian ini berupaya menelisik tentang peran sosial Muhammadiyah dalam memberikan layanan pendidikan masa kolonialisme pada masyarakat Muna. Kajian tentang layanan pendidikan Muhammadiyah masa kolonial dalam konteks pedalaman Sulawesi menjadi penting, karena selama ini studi-studi tentang peran sosial Muhammadiyah dalam bidang pendidikan lebih banyak berada dalam ruang *setting back ground* tanah Jawa, sedangkan bagaimana kiprah Muhammadiyah dalam konteks lokal luar Jawa jarang dilakukan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menyajikan data tentang kiprah sosial Muhammadiyah masa pra kemerdekaan dengan mengambil setting sosial masyarakat Muna Sulawesi Tenggara (Sultra).

Kajian tentang eksistensi gerakan Muhammadiyah dalam segala dimensinya telah banyak dilakukan oleh para peneliti, baik oleh para akademisi dalam negeri maupun oleh mereka yang berasal dari luar. Luasnya lahan garap dari gerak sosial keagamaan Muhammadiyah, menjadikan kajian-kajian yang terkait dengan Muhammadiyah juga semakin beragam. Penelitian tentang gerakan sosial Muhammadiyah dalam bidang pendidikan antara lain dijelaskan oleh Lenggono. Ia menyebutkan bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan sosial-keagamaan memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar bagi Indonesia dalam

⁴ Hafidz Arfandi, "Motif Dan Strategi Gerakan Filantropi Muhammadiyah," *Jurnal Muhammadiyah Studies* 1, no. 1 (2016): 127–55.

perjuangan kemerdekaan maupun dalam pembangunan Nasional. Pada masa kolonial, Lenggono menyebutkan bahwa sekalipun organ ini mendapat tantangan dari Belanda, namun gerakan sosial Muhammadiyah terus dilakukan yang antara lain bertujuan membendung misi kristenisasi melalui dakwah dan layanan pendidikan. Hal tersebut dilakukan oleh Muhammadiyah, karena dalam kiprahnya Belanda tidak hanya termotivasi untuk merebut Gold dan Glory, tetapi juga membawa misi Gospel⁵.

Kajian sejenis juga dapat dirujuk pada penelitian Rohman (2019). Dengan mengambil setting wilayah penelitian Sumatera Barat, Rohman menyebutkan bahwa jauh sebelum Indonesia merdeka Muhammadiyah telah memperlihatkan kiprahnya kepada masyarakat dengan mendirikan lembaga layanan pendidikan, antara lain *HIS Met de Quran* pada tanggal 1 Juli 1927 yang dipimpin oleh Parwoto Adiwijoyo. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1931, menyusul pendirian sekolah kader pemimpin yang diberi nama *Tabligh School* yang dipimpin oleh Hamka. Muhammadiyah juga mendirikan *Frobelschool* atau TK ABA (Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal) pada tahun 1939. Sekolah ini didirikan dalam rangka menandingi *Frobelschool* yang didirikan oleh

⁵ Lenggono Wahyu, “Lembaga Pendidikan Muhammadiyah (Telaah Remikiren K.H. Ahmad Dahlan Tentang Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia,” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 1 (2018): 43–62.

gereja Katholik yang berada di sebelah TK Kauman⁶. Selain mendirikan lembaga pendidikan, pada era kolonialisme, Muhammadiyah juga memberi perhatian serius terhadap ordonansi guru. tahun 1905 dengan tahun 1925 sebagaimana dapat ditelaah pada penelitian Dahlan (2020). Dahlan menyebutkan bahwa sebagai sikap perhatian yang tinggi atas dunia pendidikan, Muhammadiyah melakukan “*motie persyarikatan*” atas ordonansi 1905 dan mengambil sikap tegas (radikal) terhadap ordonansi 1925 dengan melakukan penyadaran melalui kritik-kritik secara terus-menerus terhadap Pemerintah Kolonial Hindia Belanda⁷.

Sungguhpun tiga penelitian yang disebutkan di atas, mengurai tentang peran dan gerak sosial Muhammadiyah dalam bidang pendidikan di era pra kemerdekaan, namun lokus dari penelitian tersebut berbeda dengan kajian ini. Selain itu seluruh penelitian yang disebutkan lebih menonjolkan pendekatan sejarah, sedangkan penelitian ini selain merupakan deskripsi historis, telaah atas fokus masalah dianalisis dengan menggunakan konsep *social movement theory*.

Meletakkan Muhammadiyah sebagai gerakan social bukan tanpa alasan. Bahwa selain menjalankan gerakan dan giat social secara kolektif dalam rangka mencapai tujuan bersama. Muhammadiyah tercatat alam sejarah negeri ini, bahwa sejak masa colonial hingga saat ini secara

⁶ Wahyu.

⁷ Zaini Dahlan, “Respons Muhammadiyah Di Indonesia Terhadap Ordonansi Guru Awal Abad XX,” *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences* 1, no. 1 (April 9, 2020): 26, <https://doi.org/10.30821/islamijah.v1i1.7173>.

berkesinambungan melakukan giat perberdayaan dan layanan social kepada masyarakat (Afandi, ibid). Rekam jejak sejarah yang sedemikian, sehingga Peacock (1968) menempatkan reformasi Muhammadiyah dalam konteks perubahan sosial yang sangat luas di Indonesia pada paruh kedua abad dua puluh. Karena itulah Nakamura menyebut Muhammadiyah tidak saja sebagai organ keagamaan tetapi sekaligus sebagai organ social. Dalam konteks kajian politik, gerakan sosial dijalankan dalam kerangka *state centeredness*, yaitu suatu gerakan yang menjadikan Negara sebagai epicentrum/fokus target dari gerakan. Pandangan tersebut didasarkan pada alasan, bahwa Negara merupakan satu-satunya otoritas (*source of power*). Perspektif tersebut dalam konteks kekinian mendapat banyak kritikan, terutama setelah munculnya gagasan tentang *new social movement* yang orientasi dari gerakannya berfokus pada kepedulian atau kepekaan terhadap situasi dan masalah lingkungan yang dihadapi oleh umat manusia, problem gender serta preferensi sosial. *New social movement* sebagai sebuah orientasi gerakan tidak semata-mata menjadikan atau meletakkan Negara sebagai target. Sebagai orientasi baru dari gerakan sosial, *new social movement*, melahirkan perspektif baru tentang gerakan sosial ⁸. Dalam konteks tersebut, Snow ⁹ mendefinisikan gerakan sosial sebagai tindakan kolektif terorganisir

⁸ Charles Tilly, *From Mobilization to Revolution* (London : Edison Publishing, 1978).

⁹ David Snow, *Framing Process, Ideology and Discursive Fields Dalam Blackwell Companion to Social Movement* (Massachusetts: Blackwell Publishing , 2004).

dengan tujuan melakukan “penentangan” atas setiap otoritas, baik yang bersifat institusi/struktural maupun kultural. Pandangan Snow memberikan indikator baru tentang gerakan social, sebagai suatu gerakan **yang tidak** hanya menjadikan Negara sebagai fokus satu-satunya, karena hakikatnya Negara bukan satu-satunya *source of power and authority*, tetapi mencakup sejumlah otoritas dari beragam institusi dan *cultural meaning* yang terintegrasi dalam dan atau menjadi bagian dari masyarakat (ibid). Lebih lanjut Snow menjelaskan bahwa substansi dari gerakan social adalah gerakan yang menentang *institutional authority* (apakah ia berada dalam area politik seperti Negara atau lainnya seperti korporasi, agama atau pendidikan) atau bentuk bentuk otoritas budaya seperti sistem kepercayaan dan atau implementasi aktual dari sistem kepercayaan tersebut. Terdapat tiga unsur yang dipandang memiliki pengaruh signifikan dalam sebuah konteks gerakan social, yaitu: *political opportunity spaces / Structure* (ruang kesempatan politik), *resource mobilization* (mobilisasi sumber daya), dan *social framing* (pembingkaiian sosial).

Political opportunity spaces/ Structure (POS), merupakan variable yang memberi muatan penjelasan mengenai hubungan antar perubahan dalam sebuah struktur dan sistem politik dengan upaya mobilisasi suatu gerakan¹⁰. Dalam konteks ini, situasi lingkungan struktur

¹⁰ Wiktorowicz.

politik memberikan sebuah kesempatan tersendiri bagi gerakan sosial untuk bisa muncul dan berkembang. Eishinger menyebutkan POS (Opp, 2009) adalah ruang beragam dimensi, yang tidak hanya dapat memberi kesempatan bagi tumbuhnya gerakan sosial, tetapi sekaligus dapat menghambat tumbuh kembang gerakan sosial dalam sebuah kurun waktu. Kondisi terakhir terjadi manakalah *political structure* bersifat represif. Namun secara umum dapat disimpulkan bahwa, peluang dan hambatan bagi tumbuh kembang gerakan sosial dapat dipilah menjadi dua yaitu: Pola tertutup yang menjadi hambatan bagi tumbuh kembang gerakan sosial dan pola terbuka yang memberi ruang luas dan lebih terbuka bagi tumbuh kembang sebuah gerakan sosial. Semakin kondusifnya iklim politik berarti membuka kesempatan lebar bagi tumbuhnya gerakan sosial, dan pada suasana iklim politik yang tertutup akan mempersempit atau bahkan menutup ruang tumbuh kembang gerakan sosial ¹¹.

Resource mobilization theory, disinilah gerakan sosial diaktualkan. Ketidakpuasan terhadap situasi sosial budaya yang ada tidak berarti apa-apa tanpa adanya sekelompok orang (institusi sosial) yang berupaya melakukan kegiatan mobilisasi yang tentu saja bersandar pada sumber daya yang ada. ***Social framing***, merupakan

¹¹ Rebecca Tildesley, Emanuela Lombardo, and Universitat Pompeu Fabra, “Power Struggles in the Implementation of Gender Equality Policies: The Politics of Resistance and Counter-Resistance in Universities Tània Verge,” *Politics & Gender* 18, no. 1 (2022): 879–910, <https://doi.org/10.13039/5011000110033>.

kerangka interpretasi yang memungkinkan orang untuk menempatkan, memahami, mengidentifikasi dan menamai peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sosial yang terjadi di sekitar mereka maupun dunia secara keseluruhan.¹² *Frame* berperan membantu orang menyarikan peristiwa dan atau kejadian menjadi pengalaman bermakna, kemudian mengorganisasi pengalaman tersebut dan memberi panduan untuk bertindak¹³.

B. PEMBAHASAN

1. Sekilas tentang Muna dan Muhammadiyah

Pelintasan Muhammadiyah ke jazirah Sultra, (Buton, Muna, Kolaka, dan Kendari) terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan; yaitu dalam rentan waktu 1928-1930¹⁴. Dari sumber sejarah yang ditemukan, dapat diketahui bahwa gerak melintas Muhammadiyah disalurkan oleh anak-anak panah Muhammadiyah dari beragam profesi. Secara umum agent Muhammadiyah masa awal di wilayah ini, dipelopori oleh para pegawai pemerintahan yang ditugaskan ke wilayah ini. Mereka umumnya adalah para guru dan juga para pedagang yang bermigrasi untuk mengais

¹² Wiktorowicz, "Anatomy of the Salafi Movement."

¹³ Nakamura, *The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town*.

¹⁴ Muhammad Alifuddin, Alhamuddin Alhamuddin, and Nurjannah Nurjannah, "School of Anak Laut (Sea Children): Educational Philanthropy Movement in Bajo Community of Three-Coral World Center," *Jurnal Iqra' : Kajian Ilmu Pendidikan* 6, no. 1 (June 2, 2021): 164–79, <https://doi.org/10.25217/ji.v6i1.1057>.

hidup sekaligus melakukan tugas dakwah. Melalui jasa para pegawai pemerintahan, guru dan para pedagang, visi dan misi Muhammadiyah dimasukkan ke wilayah ini dengan beragam pendekatan dan metode¹⁵.

Orientasi Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah *amar-makruf nahi mungkar* bertemu dengan kondisi sosial politik dan budaya yang dialami oleh bangsa Indonesia sebelum masa kemerdekaan, diyakini memberikan pengaruh yang besar bagi lahirnya semangat juang anak-anak Muhammadiyah untuk menanamkan pengaruhnya. Dengan merujuk pada data awal kehadiran Muhammadiyah di sekitar tahun 1928-1930 menunjukkan bahwa kehadiran Muhammadiyah di jazirah Tenggara pulau Sulawesi ini, selain bertujuan melebarkan sayap pengaruhnya, juga terkait erat dengan semangat nasionalisme anak-anak Muhammadiyah untuk membuka dan atau memutus mata rantai belenggu yang diikat oleh penjajah Belanda pada waktu itu. Atau dengan kata lain, misi para agen Muhammadiyah pada waktu itu digandengkan dengan semangat anti penjajahan.

Sebagai bagian integral dari wilayah kerajaan-kerajaan Nusantara, masyarakat yang mendiami pulau-pulau dan daratan di Sultra

¹⁵ Muhammad Alifuddin, "Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pendidikan: Sejarah Eksistensi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Di Sulawesi Tenggara," *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan* 14, no. 1 (2021): 53–74; Mohamad Joko Susilo, "Empowering Students through Autonomous Education: A Case Study of Muhammadiyah Schools," *Buletin Edukasi Indonesia* 2, no. 02 (May 2, 2023): 75–84, <https://doi.org/10.56741/bei.v2i02.305>.

sebagaimana masyarakat Nusantara lainnya memiliki hasrat dan cita-cita yang kuat untuk menjadi satu entitas sosial politik yang kuat dan berdaulat di dalam Negara dan bangsanya. Dalam konteks itulah, timbul kesadaran untuk bersatu padu dalam satu kekuatan politik Negara bangsa yang pada masa selanjutnya disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tampaknya semangat itupula yang mengantar anak-anak panah Muhammadiyah yang berasal dari berbagai daerah, untuk mengambil bagian signifikan dalam pergerakan kebangkitan Nasional melalui jalur pendidikan Muhammadiyah di Sulawesi-Tenggara¹⁶.

Kehadiran Muhammadiyah di Sultra pada masa sebelum kemerdekaan masuk melalui berbagai jalur dan entah direncanakan atau tidak, Muhammadiyah masuk secara bersamaan di wilayah *onder afdeeling*. Perlu dicatat bahwa nama Sulawesi-Tenggara sebagai satu wilayah politik administrative (propensi) baru terjadi pada masa setelah kemerdekaan dan merupakan pemekaran dari Propinsi Sulawesi-Selatan¹⁷. Catatan sejarah yang ditemukan menjelaskan bahwa pembentukan Muhammadiyah di wilayah ini, baik di daratan maupun kepulauan umumnya diperankan oleh kader-kader Muhammadiyah yang berasal

¹⁶ Alifuddin, Alhamuddin, and Nurjannah, "School of Anak Laut (Sea Children): Educational Philanthropy Movement in Bajo Community of Three-Coral World Center"; Alifuddin, "Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pendidikan: Sejarah Eksistensi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Di Sulawesi Tenggara."

¹⁷ Alifuddin, Alhamuddin, and Nurjannah, "School of Anak Laut (Sea Children): Educational Philanthropy Movement in Bajo Community of Three-Coral World Center."

dari Sulawesi-Selatan yang berkolaborasi dengan anak-anak daerah yang memiliki minat ber-Muhammadiyah. Jika dikaji berdasarkan data-data sejarah tertulis yang ditemukan, maka pembentukan Muhammadiyah di Sultra banyak diperankan oleh para pegawai yang ditugaskan ke wilayah ini (ibid). Sejarah memberi konfirmasi, bahwa sejak mula Muhammadiyah bereksistensi, organisasi ini selalu hadir untuk melayani masyarakat tanpa mengenal batas wilayah baik di kota, pedalaman, maupun pesisir. Karena itulah di Sultra, selain merambah daerah-daerah yang berada di daratan dan pedalaman, Muhammadiyah juga masuk menelisik hingga wilayah pesisir dan kepulauan dalam hal ini Buton dan Muna.

Tapak jejak Muhammadiyah di Muna layaknya ditulis sebagai tinta emas, mengingat kader-kader Muhammadiyah di Muna termasuk kelompok sosial yang berada pada garda terdepan dalam menggelorakan semangat nasionalisme. Giat Muhammadiyah di wilayah ini pada masa pra kemerdekaan sangat progresif revolusioner. Jejak sejarah Muhammadiyah di Muna sebelum masa kemerdekaan dimulai pada tahun 1930. Secara historis eksistensi Muhammadiyah di Muna dipelopori oleh seorang Bestur Asisten Zainuddin Daeng Mandrapi. Zainuddin secara diam-diam menggerakkan dakwah menganjurkan pendirian Muhammadiyah di Muna. Anjuran ini direspon secara positif oleh Abdul Kadir seorang yang menjabat kepala Kehutanan pada waktu

itu. Alasan utama diizinkan pembentukan gerakan Muhammadiyah karena di daerah tersebut telah diizinkan misi Khatolik mengembangkan ajarannya, bahkan hingga merambah ke wilayah pedalaman Muna¹⁸.

Sebelumnya gerakan Khatolik di daerah ini hanya khusus untuk melayani pegawai Belanda yang beragama Katolik tanpa izin penyebaran. Dengan berdirinya Muhammadiyah di Muna, maka organisasi ini tidak tinggal diam tetapi ditransmisikan ke pelosok desa, sehingga Muhammadiyah pada saat itu dapat tumbuh dan memberikan pengaruh di tengah masyarakat. Berkembangnya Muhammadiyah di Muna, juga ditunjang dengan adanya komunikasi yang intens antara Muhammadiyah setempat dengan Pusat melalui seorang penghubung Said Jafar dari Sulawesi Selatan (ibid). Selain tokoh yang telah disebutkan sebelumnya, pertumbuhan Muhammadiyah juga terjadi karena terdapat sejumlah anak daerah yang turut serta bergiat mendakwakan Muhammadiyah, mereka antara lain: La Kare, La Mane, Bakarang, LaOde Buntu dan La Ati. Sedangkan penggerak Muhammadiyah di desa-desa adalah La Kaniha (Bangkali), La Padoi (Batuputih), LaOde Zulfakar (Tawehu) dan LaOde Rauf (Masalihi).

Salah seorang tokoh Muhammadiyah Sultra asal Muna, Laode Arqam Ali menyebutkan, bahwa hal yang memicu pertumbuhan dan

¹⁸ Muhammad Alifuddin et al., "Religious Education in the Mitigation Space: The Significance of the Muhammadiyah Enlightenment Movement for West Sulawesi Earthquake Survivors," *Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2022): 61–74.

gerak progresif Muhammadiyah di Muna pada masa sebelum awal kemerdekaan, adalah realitas program Kristenisasi yang dijalankan oleh Zending. Tertantang oleh problem tersebut, maka sejumlah anak-anak Muna yang memiliki dasar keagamaan tertarik dan bergabung dengan Muhammadiyah untuk ikut serta membendung arus Kristenisasi tersebut¹⁹. Jika merujuk pada data-data tertulis dan penjelasan sejumlah informan, dapat dinyatakan bahwa gerakan Muhammadiyah di Muna secara historis kultural merupakan upaya perlawanan terhadap gerakan Kristenisasi. Selain faktor agama, hal yang tidak bisa diabaikan dari tumbuh kembang gerakan Muhammadiyah di Muna adalah kesadaran nasionalisme yang hidup dalam cara berpikir orang Muna pada waktu itu. Dua problem tersebut seolah mengasah kesadaran masyarakat Muna untuk bergerak menyelamatkan generasi dan turunan mereka dari bahaya pemurtadan serta membebaskan masyarakat dari cenkraman penjajahan, yang keduanya dilakukan oleh bangsa Belanda.

2. Muhammadiyah dan Gerakan Pendidikan yang Membebaskan

Tekad kuat kader Muhammadiyah untuk menyinari bumi pertiwi dengan sinar terang matahari bertujuan untuk memberdayakan masyarakat melalui gerakan dakwah, pendidikan dan layanan sosial. Dalam konteks masa awal pembentukannya, gerakan sosial dan layanan

¹⁹ Alifuddin, "Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pendidikan: Sejarah Eksistensi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Di Sulawesi Tenggara."

pendidikan sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat, mengingat pada masa tersebut layanan pendidikan masih bersifat eksklusif yang hanya dapat diakses oleh kelompok masyarakat tertentu²⁰. Kehadiran Muhammadiyah yang menegosiasikan layanan sosial bagi pencerahan akal budi oleh sebagian masyarakat diapresiasi dengan cara mendirikan ranting dan cabang Muhammadiyah di berbagai daerah di Indonesia, sehingga tanpa harus menunggu waktu yang lama gerakan ini berdiri di hampir seluruh wilayah Nusantara.

Realitas tahun 1930 (sebagai masa awal dimana masyarakat Muna berkenalan dengan Muhammadiyah) adalah situasi sosial yang penuh dinamika, dimana pada masa tersebut merupakan awal-awal tahun digulirkannya konsep kebangkitan nasional bagi bangsa Indonesia. Gerakan tersebut merupakan upaya sistematis yang dilalukan oleh anak-anak bangsa dalam rangka membebaskan Indonesia dari cengkraman kolonialisme Belanda. Mengingat kuku kekuasaan kolonial yang mencengkram dan menghegemoni bangsa Indonesia selama bertahun-tahun telah mengakibatkan kerugian dan kesengsaraan bagi anak-anak Indonesia diseluruh pelosok negeri. Berhadapan dengan realitas sosial, budaya dan politik yang membelenggu, sejumlah anak-anak Muna sebagaimana anak-anak negeri lainnya di berbagai daerah bangkit melakukan perlawanan. Data sejarah menginformasikan bahwa

²⁰ Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Moderen*.

perlawanan masyarakat Muna terhadap hegemoni Belanda, sebagian disalurkan lewat pergerakan Muhammadiyah²¹.

Gerakan perlawanan komunitas Muhammadiyah dilakukan baik melalui *dakwah bil lisan* maupun *dakwah bil hal*. Karakter gerak Muhammadiyah yang progresif dan melayani juga mengejawantah pada anggota Muhammadiyah di Muna. Melalui beberapa orang bumi putera yang aktif bergerak dalam persyarikatan menginisiasi pendirian lembaga pendidikan. Inisiasi pendirian lembaga pendidikan dipelopori oleh La Ati di Raha dan La Kare di Mabolu²². Pendirian lembaga pendidikan Muhammadiyah oleh elemen Muhammadiyah Muna, selain bertujuan sebagai layanan literasi dalam rangka mencerahkan akal budi masyarakat setempat, juga sekaligus sebagai antitesa dari gerakan pendidikan yang dilakukan oleh Khatolik. Diketahui sebelumnya, yaitu pada tahun 1932, pemerintah kolonial Belanda yang menggandeng gerakan atau usaha misionaris mendirikan sekolah di desa Lasehao pedalaman di Muna. Selain itu, Belanda mengirim beberapa pemuda Katolik untuk belajar keluar daerah, khususnya ke Manado dan Tomohon. Pendirian lembaga pendidikan tersebut oleh Belanda dan missionaris, menyimpan agenda terselubung, yaitu untuk melakukan gerakan pemurtadan atas masyarakat setempat. Tidak terima dengan gerakan tersebut maka elemen

²¹ Alifuddin, "Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pendidikan: Sejarah Eksistensi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Di Sulawesi Tenggara."

²² Alifuddin.

Muhammadiyah yang dipelopori oleh La Ati dan La Kare mendirikan sekolah sebagai kontra gerakan pemurtadan. Dalam perkembangan selanjutnya, gerakan Muhammadiyah di Muna, oleh pemerintah Belanda dipersepsi sebagai gerakan sosial dalam rangka membangun kesadaran politik masyarakat setempat. Persepsi tersebut terbentuk karena pihak Belanda merasa terganggu dengan gerakan sosial budaya yang dilancarkan oleh eksponen Muhammadiyah (Alifuddin,2019). Selain itu memang terdapat sejumlah jargon yang dikembangkan oleh eksponen Muhammadiyah yang secara eksplisit didesain untuk memicu dan membangkitkan kesadaran nasionalisme plus patriotisme masyarakat setempat guna bangkit melakukan perlawanan atas sikap hegemoni Belanda. Karena itulah, Belanda menganggap tokoh-tokoh Muhammadiyah telah menghasut rakyat agar tidak membayar pajak yang memang sangat memberatkan rakyat dan terjadinya krisis ekonomi saat itu. Belanda juga menganggap para tokoh Muhammadiyah menghina Pastor Spels lewat provokasi dakwah yang mendirikan gereja dan sekolah di Lasehao (Depdikbud,1978, 93). Perlawanan masyarakat Muna terutama elemen Muhammadiyah sangat keras dengan dicituskannya istilah-istilah rahasia yang menggambarkan perlawanan mereka terhadap Belanda. Istilah-istilah tersebut diantaranya adalah *Leokata* (lawan orang Eropa karena tidak adil) dan *Kaneko* (kas Nederkand kosong). Untuk menambah gelora dan semangat anak-anak Muhammadiyah dalam melakukan misi

penentangan kepada Belanda, maka dibentuklah gerakan kepanduan Hizbul Watan. Gerakan ini pada mulanya didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan pada tahun 1918, gerakan ini dibentuk sebagai wadah bagi anak-anak Muhammadiyah untuk membentuk karakter generasi Muhammadiyah yang memiliki jiwa nasionalisme dan cinta tanah air. Karakter tersebut sesuai dengan arti dari nama gerakan tersebut. Hizbul Watan di Muna dipelopori oleh Muhammad Syafei^{23 24}, dan dengan terbentuknya gerakan kepanduan tersebut semakin eksplisitlah langkah gerakan Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan sosial pembebasan. Dan karena hal tersebut membuat Muhammadiyah semakin dicurigai oleh Belanda²⁵.

Sebagai puncak dari kecurigaan dan kekhawatiran pihak Belanda terhadap Muhammadiyah, maka beberapa tokoh utama Muhammadiyah kemudian ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke luar wilayah Muna, mereka antara lain La Kare dan La Buntu. Sebelum diasingkan La Kare terlebih dahulu ditahan oleh pemerintah kolonial selama 2 (dua) bulan di Raha, kemudian diasingkan ke Makassar selama 6 (enam) bulan dan selanjutnya di asingkan ke Selayar selama 2 (dua) tahun dan akhirnya ke

²³ Alifuddin.

²⁴ Nakamura, *The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town*; Tilly, *From Mobilization to Revolution*.

²⁵ Setiawan, Kurniawan, and Santoso, "Ecotheological Movement of the Muhammadiyah Environmental Council in Response to the Environmental Governance Crisis."

Bulukumba selama 4 (empat) tahun. La Kare dipenjara selama 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan sedangkan La Buntu ditahan selama 5 (lima) tahun di Makassar. Sementara Zainuddin Dg. Manrapi dan Abdul Kadir dilepas dari jabatannya sebagai HBA dan Kepala Kehutanan Muna ²⁶.

Setelah para tokoh gerakan utama Muhammadiyah diasingkan, giat organisasi ini perlahan-lahan redup hingga akhirnya tidak lagi tampak dipermukaan. Namun karena rekam jejak sejarah yang dicatatkan oleh anak-anak Muhammadiyah di daratan Muna, ibarat lukisan indah yang bernilai “mahal”, maka gerak dan langkah-langkah Muhammadiyah kemudian diabadikan dalam catatan sejarah sebagai salah satu tonggak sejarah perjuangan kebangkitan nasional di daerah ini. Sejarah orang Muhammadiyah Muna adalah teladan tidak saja bagi anak-anak Muhammadiyah dan orang Muna, tetapi bagi seluruh elemen bangsa tentang perlawanan dan kerja keras tanpa kenal takut untuk membangun dan membebaskan negeri dari intervensi pihak asing, melalui gerakan pendidikan.

3. Pengabdian Muhammadiyah bagi Masyarakat Muna Masa Pra Kemerdekaan

²⁶ Alifuddin, “Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pendidikan: Sejarah Eksistensi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Di Sulawesi Tenggara”; Oman Sukmana, Zaenal Abidin, and Juli Astutik, “The Role of Islamic NGOs in The Social Welfare Movement: Study on The Muhammadiyah Organization in Malang City, Indonesia,” *Journal of Positive School Psychology*, vol. 2022, 2022, <http://journalppw.com>.

Salah satu karakter Muhammadiyah adalah mengutamakan tindakan nyata ketimbang kata-kata. Atas dasar perspektif tersebut, Muhammadiyah kemudian dapat mewujudkan puluhan ribu lembaga pendidikan di seluruh Indonesia, baik di wilayah perkotaan, pedesaan hingga wilayah-wilayah kepulauan. Ber-Muhammadiyah berarti bekerja, paradigma ini telah hidup dalam cara berpikir warga Muhammadiyah ketika awal mula organisasi ini dibangun. Dalam mengembangkan misi Islam yang dipadu dengan layanan sosial, Muhammadiyah selalu dan terus berusaha memanfaatkan setiap momentum menjadi monument. Oleh karenanya, segala ruang dan moment yang menghampirinya tidak sekedar diisi dengan pertemuan seremonial, atau diskusi adu gagasan dan konsep namun hampa tindak lanjut. Karakter demikian, sangat asing dalam tubuh persyarikatan Muhammadiyah. Kader Muhammadiyah sejak semula didik untuk menindaklanjuti gagasan dan teori dalam bentuk tindakan kongkrit di ruang sosial. Gagasan dan konsep tentang pendidikan misalnya, oleh warga Muhammadiyah diimplementasikan dengan membentuk lembaga pendidikan, mulai PAUD, SD, SLTP, SLTA hingga Perguruan Tinggi²⁷.

Perwujudan konsep dalam bentuk kegiatan nyata yang melembaga dengan istilah Amal Usaha Muhammadiyah (AUM). Pendirian AUM

²⁷ Dwi Cahyono et al., "Upgrading Tata Kelola Perguruan Tinggi Baru Di ITBK Muhammadiyah Muna Barat Sulawesi Tenggara," *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 3, no. 1 (January 30, 2023): 355–60, <https://doi.org/10.54082/jamsi.659>.

bertujuan, agar Muhammadiyah selalu menggalakkan atau mengembirakan serta mendorong semua anggotanya mencintai semua kegiatan yang berorientasi pada penegakkan ajaran Islam. Karena kalau tidak didukung oleh anggota-anggotanya tentunya cita-cita atau maksud dan tujuan Muhammadiyah tidak akan tercapai. Di dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah Pasal 4, dikemukakan amal dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, yaitu: Mempergiat dan memperdalam ilmu agama Islam; Memperteguh iman, mengembirakan dan memperkuat ibadah serta mempertinggi akhlak; Memajukan pendidikan dan kebudayaan serta memperluas ilmu pengetahuan, teknologi dan penelitian menurut tuntunan Islam. Atas dasar amanah itulah maka dimana-mana terlihat infrastruktur pendidikan Muhammadiyah, sebagai implementasi dari amanah untuk membangun bangsa.

Giat Muhammadiyah mencerdaskan kehidupan bangsa, telah dijalankan oleh persyarikatan ini jauh sebelum Indonesia Merdeka²⁸. Fakta terhadap pernyataan tersebut menyejarah secara empirik di Republik ini. Dalam konteks Muna, dapat dikatakan bahwa sejarah lembaga pendidikan Muhammadiyah di wilayah ini seumur keberadaannya, Yaitu telah dimulai pada tahun 1930-an, itu berarti pengabdian Muhammadiyah untuk anak-anak negeri Muna hingga saat

²⁸ Peacock, *Purifying the Faith: The Muhammadiyah Movement in Indonesian Islam*, Terj.

ini telah menapaki tahun ke 89. Sebuah pengabdian yang usianya bahkan melampaui usia Indonesia merdeka. Dalam *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Sulawesi-Tenggara* disebutkan bahwa ada tahun 1930-an di Muna didirikan dua sekolah Muhammadiyah yang didedikasikan untuk masyarakat setempat. Sekolah tersebut pendiriannya dipelopori oleh kader-kader Muhammadiyah. Pendirian sekolah Muhammadiyah di Muna selain sebagai upaya memberi ruang bagi bumi putera untuk menikmati pendidikan, (mengingat pada waktu tersebut suasana sekolah hanya dapat dinikmati oleh kelompok dan kalangan terbatas [Click or tap here to enter text.](#) atau bersifat diskrimintif, juga didedikasikan untuk mengalirkan nilai-nilai Islam sekaligus memperkuat fondasi nasionalisme plus membendung arus deras Kritisasi. Lembaga pendidikan Muhammadiyah pada waktu didirikan oleh La Ati yang bertempat di Raha dan satunya didirikan oleh La Kare di Mabohi menunjukkan bahwa organisasi ini memiliki perhatian yang serius bagi anak-anak negeri ini ²⁹.

Uraian giat elemen persyarikatan Muhammadiyah di Muna sebagaimana dideskripsikan, menunjukkan bahwa ada aksi nyata yang dapat diterawang, lewat data-data tertulis (sejarah), yang menunjukkan fakta bahwa Muhammadiyah Muna dalam waktu yang jauh melampaui usia bangsa ini, telah berbuat dan membangun langkah serta aksi-aksi

²⁹ Zuli Qodir et al., "A Progressive Islamic Movement and Its Response to the Issues of the Ummah," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 2 (2020): 323–52, <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V10I2.323-352>.

positifnya bagi anak bangsa di Muna. Dalam konteks itulah, jargon Muhammadiyah menerangi bangsa dan rahmat bagi semesta bukanlah drama yang sedang dibangun Muhammadiyah, tetapi memiliki akar sejarah yang dapat dibuktikan secara ilmiah dan akademis. Aksi Muhammadiyah di bidang pendidikan yang didekasikan oleh kadernya yang berdomisili di kepulauan jazirah Sultra, sebagian untuk tidak menyatakan keseluruhan merupakan aksi heroik putra-putri bangsa yang didedikasikan untuk negeri tercinta Indonesia.

Ketika Belanda dengan kekuatan dan niat jeleknya melakukan pemurtadan di bumi Muna tahun 1928, maka tampillah sejumlah anak-anak Muhammadiyah mencurahkan pikiran, tenaga bahkan nyawanya untuk membendung upaya pembodohan Belanda kepada anak-anak Bumi Putra di Muna. Aksi cerdas dan elegan ditunjukkan oleh La Ati dan La Kare seolah mewarisi kepiawaian Ahmad Dahlan dalam menentang Belanda melalui cara-cara logis, yaitu dengan mendirikan sekolah untuk anak-anak negeri Muna. Meski sekolah Muhammadiyah yang didirikan oleh La Ati dan La Kare wujudnya kini tak dapat lagi dilihat, namun jasa serta dedikasinya bagi umat Islam di Muna patut mendapat apresiasi. Jariyah La Ati dan La Kare sekarang tidak lagi sebagai bangunan fisik, tetapi torehan perlawanannya atas upaya pemurtadan yang dilakukan oleh Zending yang bekerja sama dengan Belanda merupakan investasi sosial dan budaya yang tak ternilai harganya. Agak sulit membayangkan

apa yang terjadi sekarang bagi orang-orang Muna, jika gerakan pemurtadan yang didalangi oleh misi Zending dan Belanda tidak dihalangi oleh kader-kader Muhammadiyah. Dalam konteks inilah masyarakat dan generasi Islam Muna era sekarang niscaya untuk memandang Muhammadiyah sebagai organisasi yang berjasa besar dalam mempertahankan marwah Islam pada masa lalu³⁰.

Muhammadiyah melalui tangan La Kare dan kawan-kawannya tidak saja membangunkan semangat berislam orang-orang Muna masa sebelum kemerdekaan tetapi juga aktif dalam mendorong lahirnya semangat nasionalisme di ranah tanah Muna. Gerak dan jejak-jejak Muhammadiyah hingga kini masih terekam dalam sejarah masyarakat Muna hingga hari ini. Jejak yang menginformasikan bahwa halang rintang yang dipasang oleh pihak Belanda dalam ruang struktur politik tidak cukup tangguh untuk menyitukan nyali putra-putri bangsa yang berjuang untuk memberdayakan masyarakat negerinya melalui Muhammadiyah. Dalam perjalanan lebih lanjut, akibat dari kurangnya sumber daya dan kuatnya hegemoni kekuasaan Belanda, jalan-jalan kebaikan yang ingin diukir oleh Muhammadiyah di ranah tanah Muna menjadi terhalangi. Sejumlah tokoh Muhammadiyah yang sebelumnya

³⁰ Alhamuddin Alhamuddin, *Politik Kebijakan Pengembangan Kurikulum Di Indonesia Sejak Zaman Kemerdekaan Hingga Reformasi (1947-2013)* (Jakarta: Prenada Kencana, 2019); Alhamuddin et al., "Politics of Education in Curriculum Development Policy in Indonesia from 1947 to 2013: A Documentary Research," *Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 1 (June 28, 2020): 29–56, <https://doi.org/10.14421/jpi.2020.91.29-56>.

berjuang untuk negerinya kemudian diasingkan oleh Belanda ke luar daerah mereka. Dan berdasarkan informasi sejarah, menyebutkan sejumlah figur yang menjadi aktor pendirian lembaga pendidikan Muhammadiyah di Muna pada masa pra kemerdekaan menemui ajalnya di tempat pengasingan.

4. Gerak Sosial Muhammadiyah di Muna: Perspektif New Social Movement

Secara konseptual, terdapat tiga unsur yang amat sangat menentukan bagi sukses dan majunya sebuah organ sosial. Yaitu *political opportunity spaces / Structure* (ruang kesempatan politik), *resource mobilization* (mobilisasi sumber daya), dan *social framing* (pembingkaiian sosial). Pada bagian ini, tiga unsur tersebut oleh penulis akan dijadikan alat analisis untuk membedah gerak sosial Muhammadiyah di Muna masa pra kemerdekaan.

a). Ruang kesempatan politik

Pada prinsipnya ruang berekspresi masyarakat pribumi pada masa kolonialisme, dibungkam atau mendapat rintangan dari otoritas Hindia Belanda. Halang rintang oleh Belanda terhadap bumi putera yang berniat mengembangkan kemampuannya, dalam konteks politik kolonial merupakan sebuah “kewajaran”, karena memang pada lazimnya penjajah berkeinginan untuk melakukan ekspansi terhadap negeri jajahannya. Dalam konteks itulah pelaku kolonialisme dan imperialisme, acapkali

membuat sederet aturan atau kebijakan yang di satu sisi menguntungkan mereka, namun pada sisi lain (sebaliknya) merugikan bagi negeri jajahan. Aturan semacam inilah yang kerap dijadikan sebagai landasan legitimasi kepada mereka dalam memperlakukan penduduk negeri jajahan secara tidak adil (Dahlan, h.30). Fakta sejarah menunjukkan bahwa masyarakat bumi putera yang menghadapi beragam regulasi Belanda tidak tinggal diam dan berpangku tangan. Sebaliknya berbagai aturan merugikan yang diterapkan oleh Belanda mendapat tantangan dari anak negeri. Misalnya ordonansi guru 1905 dengan 1929 mendapat tantangan keras (“radikal”) dari Muhammadiyah. Oleh karena itu, sungguhpun ruang kesempatan politik masa kolonial menjadi penghalang utama bagi tumbuh kembang gerakan sosial pendidikan yang dilakukan oleh bumi putera, namun tidak berarti peran sosial bumi putera hilang dari permukaan. Realitas tersebut tampak dalam sejarah gerakan sosial bidang pendidikan yang digaunkan oleh Muhammadiyah di Muna. Deskripsi data sejarah menunjukkan bahwa tekanan terhadap bumi putera Muna untuk bersikap kooperatif terhadap kebijakan pendidikan Belanda dengan menyusupkan misi kristenisasi terselubung, mendapat respon balik dari elemen Muhammadiyah. Upaya memaksakan layanan pendidikan dengan syarat melakukan konversi agama, direspon oleh elemen Muhammadiyah dengan mendirikan sekolah. Sekolah Muhammadiyah yang didirikan oleh La Ati di Raha dan La Kare di Mabohi secara eksplisit menunjukkan

pada sikap pantang menyerah masyarakat setempat terhadap tekanan dan intimidasi ³¹.

Deskripsi tentang langkah-langkah elemen Muhammadiyah dalam mendirikan lembaga pendidikan di Muna pada masa pra kemerdekaan, menunjukkan bahwa *close system* yang diterapkan oleh Belanda tidak selamanya ampuh membendung kreatifitas anak negeri untuk memajukan peradaban. Justru upaya Belanda melakukan hegemoni dan pemaksaan bagi bumi putra yang berniat mendapat pendidikan setelah melakukan konversi agama menghasilkan anti tesis dan atau perlawanan sekaligus munculnya sikap kreatif warga setempat menginisiasi lahirnya lembaga pendidikan. Hal tersebut terbukti dengan dibangunnya dua sekolah Muhammadiyah pada tahun 1932 di Muna ³².

Sekalipun ruang kesempatan politik tidak dibuka oleh penjajah Belanda kepada bumi putra Muna, namun dengan tekad dan semangat kuat untuk memberdayakan sekaligus menyelamatkan akidah (agama) masyarakat, memicu elemen Muhammadiyah tampil ke depan guna menunjukkan baktinya kepada anak-anak negeri Muna. Hegemoni atas anak negeri dengan jalan membatasi kesempatan pendidikan bagi bumi

³¹ Wahyu, “Lembaga Pendidikan Muhammadiyah (Telaah Remikiren K.H. Ahmad Dahlan Tentang Pembaruan Pendidikan Islam Di Indonesia”); Alifuddin, “Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pendidikan: Sejarah Eksistensi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Di Sulawesi Tenggara”; Wiktorowicz, “Anatomy of the Salafi Movement.”

³² Alifuddin, “Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pendidikan: Sejarah Eksistensi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Di Sulawesi Tenggara.”

putera pada gilirannya dijadikan kesempatan untuk menggalang perlawanan terhadap penjajah Belanda³³. Sikap kritis atas segala aturan yang diterapkan oleh kolonial Belanda bagi elemen Muhammadiyah tampaknya terjadi diberbagai daerah. Sikap yang sama ditunjukkan secara radikal oleh Muhammadiyah dalam merespon regulasi tentang ordonansi guru yang diterapkan oleh Belanda pada tahun 1925³⁴. Tampaknya apa yang dilakukan oleh elemen Muhammadiyah Muna dalam menentang kebijakan Belanda di bidang pendidikan boleh jadi merupakan bagian integral dari penentangan Muhammadiyah terhadap sikap kolonial Belanda yang mempersulit akses pendidikan bagi masyarakat pribumi³⁵.

Penentangan elemen Muhammadiyah terhadap kebijakan pendidikan yang menyisipkan misi kristenisasi oleh Belanda dan Zending, dalam kategori Snow merupakan penentangan terhadap *institutional authority*. Dimensi politik dari penentangan tersebut diarahkan kepada kolonialisme Belanda sebagai kolonial sedangkan penentangan terhadap misi kristenisasi merupakan wujud dari bentuk penentangan terhadap otoritas

³³ Alifuddin.

³⁴ Dahlan, "Respons Muhammadiyah Di Indonesia Terhadap Ordonansi Guru Awal Abad XX."

³⁵ Alhamuddin Alhamuddin, "Abd Shamad Al-Palimbani's Islamic Education Concept: Analysis of Kitab Hidayah al-Sālikin Fi Suluk Māsālāk Lil Muttāqin," *Qudus International Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (2018): 89–102, <https://doi.org/10.21043/qijis.v6i1.3717>.

budaya seperti sistem kepercayaan dan atau implementasi aktual dari sistem kepercayaan tersebut (Snow,2004, h.9).

Sungguhpun ada upaya yang jelas tegas melakukan penentangan atas kebijakan Belanda yang menghalang-halangi bumi putera untuk mengenyam pendidikan, namun politik repressif Belanda menyebabkan elemen-elemen Muhammadiyah yang memilih jalan melakukan perlawanan harus berhadapan dengan kenyataan. Sejumlah tokoh penting penggerak pendidikan Muhammadiyah kemudian ditahan, dipenjarakan hingga diasingkan ke luar Muna, sehingga lembaga pendidikan yang mereka dirikan tidak dapat berkembang dan akhirnya terhenti. Fakta ini sesuai dengan teori sosial yang menyebutkan bahwa ruang kesempatan politik adalah wilayah ruang multidimensi yang tidak hanya dapat memberi kesempatan bagi tumbuhnya gerakan sosial, tetapi juga dapat menghambat berkembangnya gerakan sosial dalam sebuah kurun waktu. Kondisi terakhir terjadi manakalah *political structure* bersifat represif.. Kondisi terakhir inilah yang dialami oleh gerakan sosial pendidikan Muhammadiyah di Muna pada masa pra kemerdekaan.

b). Mobilisasi Sumber Daya

Bahwa dalam faktanya Muhammadiyah Muna dapat mendirikan plus memberi layanan pendidikan kepada anak bangsa di Raha dan Mabohi pada era pra kemerdekaan, menunjukkan secara kasat tentang kepedulian plus tanggung jawab sosial budaya elemen Muhammadiyah

terhadap masyarakat. Sebagaimana diketahui masa 1930-an ketika La Ati dan La Kare mendirikan sekolah Muhammadiyah, adalah era perjuangan dan penuh tantangan dari penjajah Belanda. Tidak mudah bagi masyarakat pada saat itu membangun lembaga pendidikan. Selain karena keterbatasan akses dan sumberdaya, kuatnya hegemoni dari penjajah Belanda menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan mewujudkan lembaga layanan pendidikan yang dapat memberi akses serta kesempatan bagi seluruh warga. Meski demikian elemen Muhammadiyah dengan dukungan warga setempat berupaya keras mewujudkan Amal Usaha Muhammadiyah bidang pendidikan. Oleh karena itu, kendatipun mendapat tantangan kuat dari kolonial, elemen Muhammadiyah Muna dalam kenyataannya dapat mewujudkan lembaga pendidikan guna melayani kebutuhan atau hasrat masyarakat setempat menimba ilmu. Fenomena tersebut sekaligus menunjukkan pada kemampuan elemen Muhammadiyah memobilisasi sekaligus memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki.

Informasi sejarah yang diperoleh dari sumber resmi tidak secara tegas menunjukkan apa saja sumberdaya yang dimiliki oleh Muhammadiyah Muna pada waktu itu. Data-data tertulis hanya menyebutkan bahwa pada saat tersebut terdapat sejumlah sosok atau figur yang berada dibalik pendirian Muhammadiyah, antara lain Bestur Asisten Zainuddin Daeng Mandrapi. Zainuddin disebutkan sebagai salah

satu subyek yang menginisiasi lahirnya Muhammadiyah di Muna. Pendirian organ ini selain bertujuan untuk memperkuat basis pemahaman masyarakat tentang Islam, juga untuk membendung program kristenisasi yang dilancarkan oleh Zending yang mendapat sokongan dari penjajah Belanda. Upaya Zainuddin mendapat sambutan positif dari seorang pejabat Kepala Kehutanan bernama Abdul Kadir. Berawal dari dua sosok tersebut, kemudian sejumlah putra daerah Muna memperkuat barisan Muhammadiyah, mereka antara lain La Kare, La Mane, Bakarang, LaOde Buntu dan La Ati. Sedangkan penggerak Muhammadiyah di desa-desa adalah La Kaniha (Bangkali), La Padoi (Batuputih), LaOde Zulfakar (Tawehu) dan LaOde Rauf (Masalihi)³⁶.

Deskripsi di atas menunjukkan bahwa elemen Muhammadiyah pada masa era 19030-an memiliki penggerak dari kalangan tokoh masyarakat dan figur birokrat berkualitas, di antaranya seorang Bestur dan Kepala Kehutanan. Sejumlah tokoh dan figur sebagaimana dimaksud dalam kategorisasi Karl Dieter Opp merupakan elemen sumber daya yang amat penting, selain aspek finansial, akses terhadap media, dukungan anggota dan simpatisan, loyalitas kelompok, penguasaan ilmu dan skill, demikian

³⁶ Alifuddin, "Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pendidikan: Sejarah Eksistensi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Di Sulawesi Tenggara"; Wiktorowicz, "Anatomy of the Salafi Movement"; Snow, *Framing Process, Ideology and Discursive Fields Dalam Blackwell Companion to Social Movement*.

pula dengan ideologi yang dimiliki oleh aktor³⁷ Edwards dan McCharty³⁸ membagi *resources* ke dalam beberapa tipe. Yaitu: (1). Moral resources, (2) Cutural resources, (3). Sosial organization resources, (4). Human resources, dan (5). Material resources³⁹()). Opp sebagaimana Edwards dan McCharty, berpendapat bahwa sumber daya tidak bertumpu semata-mata pada kekuatan material, bahkan Edwards dan McCharty menempatkan kekuatan material pada unsur kelima setelah kekutan moral, kultur (budaya) social organization, dan manusia. Tata urut sumber daya sebagaimana disebutkan sungguhpun boleh jadi tidak dimaksudkan oleh Edwards dan McCharty sebagai sesuatu yang bersifat hirakis, namun kekuatan hirarkis sumber daya sebagaimana disebutkan elan vitalnya dapat ditelisik pada gerakan sosial Muhammadiyah dalam membangun lembaga pendidikan di Muna masa pra kemerdekaan.

Figur-figur yang berada dibalik pendirian lembaga pendidikan Muhammadiyah sebagaimana disebutkan sebelumnya secara prinsip berhasil memobilisasi sumberdaya atau kekuatan moral, budaya serta ikatan sosial masyarakat setempat untuk bangkit dan sadar terhadap pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak Muna. Kekuatan

³⁷ Alifuddin, "Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pendidikan: Sejarah Eksistensi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Di Sulawesi Tenggara."

³⁸ Alifuddin, Alhamuddin, and Nurjannah, "School of Anak Laut (Sea Children): Educational Philanthropy Movement in Bajo Community of Three-Coral World Center."

³⁹ Wiktorowicz, "Anatomy of the Salafi Movement."

tersebut dapat dimobilisasi secara cerdas oleh tokoh-tokoh Muhammadiyah, sehingga pada gilirannya sumber daya yang ada pada masa itu memiliki kekuatan moral untuk tampil mempersembahkan layanan pendidikan kepada masyarakat.

Hal yang tidak dapat dipungkiri adalah, bahwa kehadiran lembaga pendidikan Muhammadiyah di Muna pada tahun 1932, terkait erat dengan kemampuan figur-figur atau aktor yang berada dibalik pendirian lembaga tersebut. Karena sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa tokoh-tokoh penggerak Muhammadiyah di antaranya seorang Bestur dan Kepala Kehutanan. Realitas tersebut menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang dimiliki oleh Muhammadiyah sangat potensial untuk menggerakkan perubahan. Kekuatan sumber daya manusia Muhammadiyah semakin kokoh dengan bergabungnya sejumlah tokoh masyarakat setempat. Keikutsertaan sejumlah tokoh lokal ke dalam Muhammadiyah semakin memperkuat daya dorong dan mobilisasi sumberdaya milik persyarikatan, sehingga menjadi sangat rasional dan realistis jika elemen Muhammadiyah mampu atau dapat mewujudkan pendirian lembaga pendidikan sekalipun dalam ruang kesempatan politik yang sempit.

c). Framing proses

Berdirinya lembaga pendidikan Muhammadiyah di Muna pada tahun 1932 merupakan penanda eksplisit dari keseriusan

Muhammadiyah, sekaligus sebagai upaya warga persyarikatan menjawab serta memenuhi asa sebagian masyarakat Muna untuk mendapatkan layanan pendidikan bagi generasi pelanjut mereka. Semangat membangun dan menginisiasi lembaga pendidikan oleh elemen persyarikatan Muhammadiyah sebagaimana disebutkan tidaklah berada dalam ruang hampa budaya. Dalam artian perwujudan lembaga pendidikan dimaksud tidak terlepas atau niscaya melalui sebuah proses sosialisasi sistematis kepada elemen-elemen sosial terkait. Kemampuan sosialisasi dengan cara elegan, dalam perspektif gerakan sosial di sebut dengan *framing*. Yaitu aktivitas yang merujuk pada fenomena aktif dan berproses dengan melibatkan agen dalam membangun realitas. Goofman menyebutkan *framing* adalah skema dari intepretasi yang memungkinkan individu, dapat atau mampu memetakan, memahami dan mengidentifikasi serta memberi label atas setiap peristiwa atau kejadian dalam ruang sosial budaya dan atau dalam ranah kehidupan dunia secara umum ⁴⁰.

Informasi sejarah menjelaskan bahwa pada tahun 1932 Belanda yang bekerja sama dengan Zending mendirikan sekolah dengan misi kristenisasi terselubung. Pada saat yang sama Belanda menciptakan halang rintang bagi masyarakat pribumi untuk mengenyam pendidikan kecuali bagi mereka yang bersedia melakukan konversi agama. Kondisi

⁴⁰ Snow, *Framing Process, Ideology and Discursive Fileds Dalam Blackwel Companion to Social Movement*.

tersebut direspon oleh Muhammadiyah dan masyarakat setempat dengan perlawanan. Halang rintang yang dipasang oleh pihak Belanda dalam ruang struktur politik tidak cukup tangguh untuk menyitukan nyali putra-putri bangsa yang berjuang untuk memberdayakan masyarakat negerinya melalui Muhammadiyah. Meski ruang struktur politik yang dihadapi tertutup atau ditutup untuk menyemai bibit pemberdayaan, namun kuatnya girah Islam pada elemen Muhammadiyah untuk menyelamatkan akidah masyarakat setempat, menjadikan mereka terus tampil sebagai salah satu anti tesa dari program Belanda yang berkolaborasi dengan Zending⁴¹.

Sempitnya ruang untuk mengepresikan dedikasi sosial sebagai akibat hegemoni pihak Belanda pada masa itu, mengantar komunitas Muhammadiyah Muna melakukan *framing* atas rencana mereka positif mereka membangun layanan pendidikan. Yaitu membangun sekolah agama bagi anak-anak Muna sebagai anti tesa kegiatan Zending dan atau untuk menyelamatkan agama mereka. Perlu diingat pada saat tersebut Zending juga sementara melakukan *framing* layanan social pendidikannya. Yaitu untuk mengeluarkan sebagian masyarakat Muna dari keadaan gelap gulita ruang literasi, namun dibalik layanan pendidikan tersebut, Zending lagi berusaha menjalankan politik

⁴¹ J Erawan, Y Abdul Azis, and I Satibi, "Transformational Leadership Model of Muhammadiyah Branch Leaders in Bandung Regency," *JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2023): 2023, <https://doi.org/10.35326/jsip.v4i2.3253>.

agamanya untuk mengalihkan sejumlah muslim kepada keyakinan Kristen, melalui bantuan layanan pendidikan (Depdikbud, 1978). Realitas sebagaimana dideskripsikan sejalan dengan uraian yang dijelaskan dalam buku; *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia* (1986), yang mengungkapkan bahwa, pada masa pemerintah jajahan sekolah-sekolah didirikan semata-mata untuk kepentingan penjajah Belanda...., di pihak lain, Belanda memberikan kesempatan yang luas pada misi dan zending agama Kristen untuk mendirikan sekolah-sekolah yang dibiayai oleh gereja ⁴²

C. PENUTUP

Berangkat dari deskripsi dan analisa atas data yang ada, penelitian ini menyimpulkan hal –hal sebagai berikut iini. Secara historis Muhammadiyah memiliki berperan signifikan dalam proses pencerahan akal budi terhadap masyarakat Muna masa pra kemerdekaan. Hal tersebut setidaknya ditandai dengan giat pencerahan melalui jalur pendidikan, yaitu dengan mendirikan sekolah di Raha dan Mabohi. Lembaga pendidikan tersebut merupakan anti tesa dari gerakan pendidikan berbasis Kristen yang diinisiasi oleh Zending. Oleh karena itu, selain aspek pencerahan akal budi melalui lembaga pendidikan yang didirikannya, Muhammadiyah pada masa pra kemerdekaan juga turut

⁴² Alifuddin, “Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pendidikan: Sejarah Eksistensi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Di Sulawesi Tenggara.”

andil dalam membangkitkan rasa nasionalisme masyarakat setempat dan juga berjasa dalam menyelamatkan aqidah masyarakat dari gerakan pemurtadan yang dilakukan Zending dengan dukungan penjajah Belanda.

Meskipun lembaga pendidikan Muhammadiyah yang didirikan di Muna masa pra kemerdekaan wujudnya tidak lagi tampak, namun keberhasilan organ ini mendirikan plus memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat bumi putera pada masa tersebut patut diapresiasi. Kemampuan elemen Muhammadiyah masa pra kemerdekaan membangun dan memberi layanan pendidikan kepada masyarakat setempat, merupakan bukti dari partisipasi sosial organisasi ini kepada anak bangsa. Sungguhpun posisi politik Muhammadiyah pada waktu berada dalam ruang sempit dan penuh tekanan dari pemerintah kolonial Belanda, namun faktanya mereka tetap mampu menggerakkan dan memobilisasi sumber daya yang ada sehingga mereka berhasil mendirikan sekolah berbasis Islam sebagai anti tesa dari sekolah yang didirikan oleh Zending.

DAFTAR PUSTAKA

Alhamuddin, Alhamuddin. “Abd Shamad Al-Palimbani’s Islamic Education Concept: Analysis of Kitab Hidayah al-Sālikin Fi Suluk Māsālāk Lil Muttāqin.” *Qudus International Journal of Islamic Studies* 6, no. 1 (2018): 89–102. <https://doi.org/10.21043/qijis.v6i1.3717>.

———. *Politik Kebijakan Pengembangan Kurikulum Di Indonesia Sejak Zaman Kemerdekan Hingga Reformasi (1947-2013)*. Jakarta: Prenada Kencana, 2019.

Alhamuddin, Ahmad Fanani, Ilyas Yasin, and Andi Murniati. “Politics of Education in Curriculum Development Policy in Indonesia from 1947 to 2013: A Documentary Research.” *Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 1 (June 28, 2020): 29–56. <https://doi.org/10.14421/jpi.2020.91.29-56>.

Alifuddin, Muhammad. “Muhammadiyah Sebagai Gerakan Pendidikan: Sejarah Eksistensi Perguruan Tinggi Muhammadiyah Di Sulawesi Tenggara.” *Al-TA'DIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan* 14, no. 1 (2021): 53–74.

Alifuddin, Muhammad, Alhamuddin Alhamuddin, and Nurjannah Nurjannah. “School of Anak Laut (Sea Children): Educational Philanthropy Movement in Bajo Community of Three-Coral World Center.” *Jurnal Iqra': Kajian Ilmu Pendidikan* 6, no. 1 (June 2, 2021): 164–79. <https://doi.org/10.25217/ji.v6i1.1057>.

Alifuddin, Muhammad, Suarni, Alhamuddin, and Ahmad Fanani. “Religious Education in the Mitigation Space: The Significance of the Muhammadiyah Enlightenment Movement for West Sulawesi Earthquake Survivors.” *Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 1 (2022): 61–74.

Arfandi, Hafidz. “Motif Dan Strategi Gerakan Filantropi Muhammadiyah.” *Jurnal Muhammadiyah Studies* 1, no. 1 (2016): 127–55.

- Cahyono, Dwi, Rasid Rasid, La Ode Muhammad Ady Ardyawan, Evi Lestari, and Muh. Bayu. “Upgrading Tata Kelola Perguruan Tinggi Baru Di ITBK Muhammadiyah Muna Barat Sulawesi Tenggara.” *Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia* 3, no. 1 (January 30, 2023): 355–60. <https://doi.org/10.54082/jamsi.659>.
- Dahlan, Zaini. “Respons Muhammadiyah Di Indonesia Terhadap Ordonansi Guru Awal Abad XX.” *Islamijah: Journal of Islamic Social Sciences* 1, no. 1 (April 9, 2020): 26. <https://doi.org/10.30821/islamijah.v1i1.7173>.
- Erawan, J, Y Abdul Azis, and I Satibi. “Transformational Leadership Model of Muhammadiyah Branch Leaders in Bandung Regency.” *JSIP: Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan* 4, no. 2 (2023): 2023. <https://doi.org/10.35326/jsip.v4i2.3253>.
- Joko Susilo, Mohamad. “Empowering Students through Autonomous Education: A Case Study of Muhammadiyah Schools.” *Buletin Edukasi Indonesia* 2, no. 02 (May 2, 2023): 75–84. <https://doi.org/10.56741/bei.v2i02.305>.
- Nakamura, Mitsuo. *The Crescent Arises over the Banyan Tree: A Study of the Muhammadiyah Movement in a Central Javanese Town*. Cornell University, 1976.
- Peacock, James L. *Purifying the Faith: The Muhammadiyah Movement in Indonesian Islam*, Terj. Yogyakarta: Andi Makmur Makkah, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1968.
- Qodir, Zuli, Hasse Jubba, Mega Hidayati, Irwan Abdullah, and Ahmad Sunawari Long. “A Progressive Islamic Movement and Its

Response to the Issues of the Ummah.” *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 10, no. 2 (2020): 323–52. <https://doi.org/10.18326/IJIMS.V10I2.323-352>.

Setiawan, Hendy, Nanang Indra Kurniawan, and Purwo Santoso. “Ecotheological Movement of the Muhammadiyah Environmental Council in Response to the Environmental Governance Crisis.” *Millah: Journal of Religious Studies*, October 13, 2022, 639–70. <https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss3.art2>.

Snow, David. *Framing Process, Ideology and Discursive Fileds Dalam Blackwel Companion to Social Movement*. Massachusets: Balckwell Publishing, 2004.

Steenbrink, Karel A. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun Moderen*. Jakarta: LP3ES, 1994.

Sukmana, Oman, Zaenal Abidin, and Juli Astutik. “The Role of Islamic NGOs in The Social Welfare Movement: Study on The Muhammadiyah Organization in Malang City, Indonesia.” *Journal of Positive School Psychology*. Vol. 2022, 2022. <http://journalppw.com>.

Suryana, Cecep. “Kiprah Politik Dan Sejarah Organisasi Muhammadiyah Di Indonesia.” . . *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies* 4, no. 14 (2009): 625–38.

Tildesley, Rebecca, Emanuela Lombardo, and Universitas Pompeu Fabra. “Power Struggles in the Implementation of Gender Equality Policies: The Politics of Resistance and Counter-Resistance in

Universities Tània Verge.” *Politics & Gender* 18, no. 1 (2022): 879–910. <https://doi.org/10.13039/5011000110033>.

Tilly, Charless. *From Mobilization to Revolution*. London: Edison Publishing, 1978.

Wahyu, Lenggono. “Lembaga Pendidikan Muhammadiyah (Telaah Remikiren K.H. Ahmad Dahlan Tentang Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia.” *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam* 19, no. 1 (2018): 43–62.

Wiktorowicz, Quintan. “Anatomy of the Salafi Movement.” *Studies in Conflict and Terrorism*, April 2006. <https://doi.org/10.1080/10576100500497004>.